



**PERAN KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA CIPAYUNG
KECAMATAN PADARINCANG
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN**

Disusun Oleh:

Herwan

NPM 192070251

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana (S.IP)
Program Studi Ilmu Politik

**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA
2023**

**KOREKSI PENGUJI**

NO

Dokumen

Tanggal

Terbit

Revisi

: 028/KP/A/STIP-AN

: 9 September 2016

: 1

Nama : Herwan

NPM :192070251

Angkatan/Kelas : VIIIA1

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : Peran Kepala desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Tanggal SUP : 30 Agustus 2023

NO	Pembimbing/Penguji	Halaman Perbaikan	Saran Pembimbing/Penguji	Status Perbaikan	Paraf
1	Dr. Sumarsono,MDM		Perbaiki operasionalisasi Konsep	Sdh diperbaiki	
2	Rahadi Budi Prayitno,S.IP,M.si		- Kesimpulan dipebaiki - Saran diperbaiki	Sdh diperbaiki	
3	Jovan Prima Firmansyah,S.Sos,M.Hum		- Pembahasan ditambahkan data tentang pembangunan infrastruktur -	Sdh diperbaiki	

Mengetahui
Program Studi Ilmu Politik
Ketua

Rahadi Budi Prayitno,S.IP,M.Si

Jakarta, 30 Agustus 2023
Pembimbing

Wahyudi Pramono,S.Ag,M.Si

**Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di
Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.**

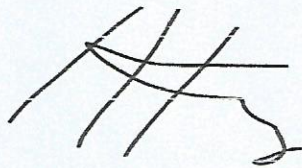
Herwan

192070251

SKRIPSI

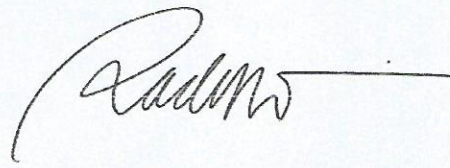
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Sarjana (S.IP)
Program Studi Ilmu Politik

Diperiksa dan disetujui oleh:



Wahyudi Pramono, S.Ag., M.Si

Pembimbing



Rahadi Budi Prayitno, S.IP., M.Si

Ketua Program Studi

Tanggal:

Tanggal:

Mengetahui
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
Atas Nama Ketua
Wakil Ketua.



Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si

Tanggal:

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herwan
NPM : 192070251
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar karya akhir ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Jakarta, 17 Oktober 2023
Yang Menyatakan



Herwan

**KOREKSI PENGUJI**

NO

Dokumen

Tanggal

Terbit

Revisi

: 028/KP/A/STIP-AN

: 9 September 2016

: 1

Nama : Herwan

NPM :192070251

Angkatan/Kelas : VIIIA1

Program Studi : Ilmu Politik

Judul : Peran Kepala desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Tanggal SUP : 30 Agustus 2023

NO	Pembimbing/Penguji	Halaman Perbaikan	Saran Pembimbing/Penguji	Status Perbaikan	Paraf
1	Dr. Sumarsono,MDM		Perbaiki operasionalisasi Konsep	Sdh diperbaiki	
2	Rahadi Budi Prayitno,S.IP,M.si		- Kesimpulan dipebaiki - Saran diperbaiki	Sdh diperbaiki	
3	Jovan Prima Firmansyah,S.Sos,M.Hum		- Pembahasan ditambahkan data tentang pembangunan infrastruktur -	Sdh diperbaiki	

Mengetahui
Program Studi Ilmu Politik
Ketua

Rahadi Budi Prayitno,S.IP,M.Si

Jakarta, 30 Agustus 2023
Pembimbing

Wahyudi Pramono,S.Ag,M.Si

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA CIPAYUNG KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

Oleh

Herwan

NPM: 192070251

Pembimbing: Wahyudi Pramono,S.Ag,M.Si

Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan diharapkan dapat manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang serta mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di jalan desa sudah cukup baik namun perlu untuk ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dilihat dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pemantauan. Faktor pendukung dalam kegiatan ini, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan. Sedangkan faktor penghambat yaitu belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal.

Kata Kunci : Peran, Pembangunan, Infrastruktur

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT. Yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa Usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun perbaikan Skripsi ini ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril dan materil, sehingga Usulan Penelitian ini ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan Terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ermaya Suradinata, S.H.,M.S.,M.H. selaku Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.
2. Bapak Dr. Sumarsono.MDM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta.

3. Bapak Rahadi Budi Prayitno,S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam penulisan Usulan penelitian ini.
4. Bapak Wahyudi Pramono,S.Ag,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.
5. Kedua Orang Tua Penulis yang tidak hentinya memberikan dukungan, Doa dan Semangat.
6. Suami dan anak-anak Penulis yang selalu memberikan dukungan dan doanya
7. Teman-Teman Angkatan VIIIA1 yang sama-sama berjuang di dalam peulisan Usulan Penelitian ini

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam peyusunan Skripsi ini, karena keterbatasan pemahaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membantu untuk menyempurnakan Skripsi ini penulis akan sangat menghargainya.

Jakarta, 17 Oktober 2023
Penulis



HERWAN
192070251

DAFTAR ISI

HAIAMAN JUDUL _____	i
HALAMAN PENNGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KARYA AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR _____	v
DAFTAR ISI _____	vii
DAFTAR TABEL _____	x
DAFTAR GAMBAR _____	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah_____	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian_____	5
1.3 Perumusan Masalah_____	5
1.4 Tujuan Penelitian_____	6
1.5 Kegunaan Penelitian_____	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis_____	8
<u>2.1.1</u> Pemerintah_____	8
<u>2.1.2</u> Pemerintah Desa_____	9
<u>2.1.3</u> Teori Peran	11
2.1.4 Kepala Desa	14
2.1.5 <u>Teori Pembangunan</u> _____	17
2.1.6 Teori Infrastruktur.....	18
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan_____	19
2.3 Kerangka Pemikiran dan Opreasionalisasi Konsep_____	25
2.3.1 Kerangka Pemikiran.....	25
2.3.2 Operasionaisasi Konsep.....	27

2.4 Hipotesis.....	33
--------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	35
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2.2 Jadwal Penelitian.....	36
3.3 Latar/ Setting Penelitian.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4.1 Teknik Observasi.....	37
3.4.2 Teknik Wawancara.....	39
3.4.3 Teknik Studi Dokumentasi.....	41
3.5 Teknik Analisis Data.....	41
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

4.1 Gambaran Umum Lokasi.....	44
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	50
4.2.1 Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Cipaung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.....	50
4.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Cipayung Kecamatan Padarincanng Kabupaten Serang.....	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 85

5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....88

LAMPIRAN..... 90

1. Pedoman Observasi.....	90
2. Pedoman Wawancara.....	91

3. Surat Ijin Penelitian.....	94
4. Dokumetasi Wawancara.....	96
RIWAYAT HIDUP.....	99

DAFTAR TABEL

-	Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep	27
-	Tabel 2.2 Jadwal Penelitian	36
-	Tabel 3.3 Daftar Informan	41

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Peta Desa Cipayung	35
- Gambar 3.3 Komponen Analisis Data	42
- Gambar 3.4 Triangulasi	46

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Pedoman Observasi	90
- 2 Pedoman Wawancara	91
- 3. Surat Ijin Penelitian	94
- 4.Dokumentaso wawancara	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik. Sedangkan tujuan dari pembangunan adalah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera baik materil maupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya sangat ditunjang oleh manajemen dan organisasi yang baik, karena dalam manajemen terkandung unsur perencanaan yang terorganisasi dengan baik. Tanpa adanya rencana, maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam rangka usaha pencapaian tujuan.

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana yaitu orang yang merealisasikan rencana dan sanggup serta mampu mewujudkan menjadi manfaat dan kenikmatan bagi orang desa melalui proses yang ajar dan tepat.

Untuk tercapainya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang terpenting bagi pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kepala desa sebagai koordinator dan administrator pemerintahan Desa. Selain itu untuk dapat terwujudnya pembangunan desa diperlukan adanya

kemampuan Kepala Desa dalam bekerja sama dengan perangkat Desa dan masyarakat melalui lembaga-lembaga desa.

Sementara pembangunan fisik yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya : sarana perumahan, sarana peribadatan, sarana pembangunan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Pelaksanaan pembangunan fisik ditunjukkan dengan adanya proyek-proyek pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana fisik. Sehubungan dengan hal tersebut, Sujarto (1985:13) mengemukakan beberapa contoh proyek pembangunan fisik yang merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik, yaitu:

1. Proyek fisik dari pembangunan bidang sosial, antara lain:
 - Pembangunan jalan
 - Pembangunan tempat ibadah
 - Bangunan/prasarana pemerintahan
 - Jaringan fasilitas umum dan lain-lain.
2. Proyek fisik pembangunan sosial budaya, antara lain:
 - Bangunan/prasarana sekolah/pendidikan
 - Bangunan tempat ibadah

- Bangunan seni budaya
 - Bangunan museum sejarah dan lain-lain.
3. Proyek fisik dari pembangunan sosial ekonomi, antara lain:
- Pasar dan pusat pertokoan
 - Pusat perkantoran dan perdagangan
 - Bangunan pergudangan
 - Terminal dan stasiun kereta api
 - Jalan raya dan sebagainya.

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya Pembangunan Infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak

mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.

Terkait peran Kepala Desa bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pembangunan di daerahnya dan mencukupi segala kebutuhan warganya salah satunya adalah menyediakan fasilitas umum lewat pembangunan infrastruktur. Dilihat secara garis besar, masyarakat Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Banten sangat memerlukan adanya sarana dan prasarana infrastruktur untuk mempermudah masyarakatnya melakukan aktifitas sehari-hari mereka. Masyarakat Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Banten juga harus dapat menyadari akan kebutuhan pokok mengenai pembangunan desa, mereka harus diberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya suatu pembangunan desa mereka melalui pelaksanaan program pemerintah yang lebih menitik beratkan kepada peningkatan pembangunan desa tempat mereka tinggal, sehingga mereka lebih banyak memiliki tanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Dalam pembangunan infrastruktur di desa, penelitian ini akan meneliti peran kepala desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten, dalam pembangunan di desa.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

- a) Penelitian ini berfokus pada Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Serang – Banten
- b) Subfokus penelitian ini adalah
 - 1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Serang – Banten.
 - 2. Faktor penghambat dan pendukung mendukung proses pembangunan jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Serang – Banten.
 - 3. Upaya mengatasi hambatan Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Serang – Banten.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana peran Kepala Desa Cipayung dalam meningkatkan pembangunan infrastuktur di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2018 – 2019?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat Peran Kepala Desa Cipayung dalam pembangunan infrstruktur di desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten 2018 – 2019?
3. Apa upaya mengatasi hambatan Peran Kepala Desa Cipayung dalam pembangunan infrstruktur di desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten 2018 – 2019?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang provinsi Banten Tahun 2018 – 2019.
2. Untuk menganalisa faktor pendorong dan penghambat Kepala Desa Cipayung pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2018 – 2019.

3. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan pembangunan infrastruktur di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2018 – 2019.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

A. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengembangkan teori-teori ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa.

B. Secara Praktis

1. Bagi pemerintah Desa, hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pemerintah Desa dalam hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa.
2. Bagi Akademisi hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti, memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah mengenai peranan pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa.

BAB II.

KERANGKA TEORI

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Pemerintah

Menurut Suradinata Pemerintah adalah suatu yang memiliki kekuatan yang paling besar di suatu negeri, tergolong urusan publik, teritorial, dan sebuah urusan dominasi untuk menjangkau tujuan negara.

Dalam hal ini pemerintah adalah suatu lembaga atau badan politik yang memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan negara dimana lembaga tersebut di berikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah serta pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga dimana mereka ditempatkan.

1. Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli :

Menurut Pranadjaja (2003:24), menjelaskan bahwa istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan pemerintah adalah badan atau aparat dihapus atau memberi perintah. Dari pengertian dan defini diatas, penulis berpendapat bahwa pemerintah adalah suatu lembaga organisasi yang mempunyai pengaruh besar, yang menyangkut urusan masyarakat, urusan kekuasaan dengan memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan, serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Menurut Ermaya Suradinata (2002:14-15) bahwa pemerintah adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pandangan tentang pemerintah tersebut luas, karena semua aktivitas kegiatan negara diselenggarakan dalam rangka memberikan kesejahteraan dan rasa aman pada masyarakat. Proses tersebut melibatkan militer, kepolisian, fungsi legislatif, keuangan dan penegak hukum yang berkeadilan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pembangunan bagi kepentingan bangsa.

Sedangkan menurut Ryaas Rasyid (2002:21) “pemerintah adalah selalu dilihat sebagai perpaduan antara lain (konstitusi, hukum, dan etika) lembaga-lembaga yang berwenang mengelola serangkaian kekuasaan (eksekutif dan yudikatif) serta sejumlah birokrat dan pejabat publik sebagai pelaku dari penanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut”.

2.1.2 Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desa. “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebutb dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerinthan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2002:90) “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya langsung kesatuan masyrakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah

langsung di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri di dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemerintah Desa menurut Widjaja (2003:3), diartikan sebagai penyelenggara pemerintah Desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggara pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati.

Menurut Dwipayana dkk (2004:11) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat, menjadi rumusan yang berbunyi “Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Desa” sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasaan Desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan Desa yang disesuaikan dengan adat istiadat kebutuhan dan partisipasi warganya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas kepentingan dasar politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, pada umumnya warga hidup dari pertanian dan mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

2.1.3 Teori Peran

1. Pengertian Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi

dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan / status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuannya, keduanya tidak dapat dipisah karena saling ketergantungan menurut Soekanto (2009). Peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat pada organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur social masyarakat.

Peran menurut Henry Mintzberg (2009) yang dikutip Syamsir Torang adalah menggambarkan sikap yang harus dilakukan seseorang dalam mengelola atau menggerakkan suatu organisasi. Dalam mengelola suatu organisasi diperlukan

adanya jalinan hubungan antar pribadi, menjaring informasi, dan pengambilan keputusan.

1. Menjalin Hubungan Antarpribadi

Ada 3 peran yang harus di jalankan oleh seorang pemimpin dalam menjalin hubungan antarpribadi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemimpin simbolis ditugaskan untuk menjalankan kewajiban rutin yang bersifat legal dan sosial.
- b. Pemimpin ditugaskan untuk memotivasi, melatih, mengisi staf dan melakukan semua aktivitas bersama karyawan.
- c. Penghubung bertugas untuk memperluas jaringan, memberikan informasi dan melakukan semua aktivitas yang melibatkan pihak eksternal.

2. Menjaring Informasi

Ada 2 peran yang harus di jalankan seorang pemimpin dalam menjaring informasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemantau ditugaskan untuk mencari dan menerima informasi internal dan eksternal.
- b. Penyalur ditugaskan untuk meneruskan informasi yang didapatkan kepala anggota/karyawan organisasi.

3. Peran dalam Pengambilan Keputusan

Ada 4 peran yang harus di jalankan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut :

- a. Wirausahawan yang ditugaskan untuk mencari mencari peluang dan usaha untuk mengembangkan organisasi dengan jalan pengorganisasian strategis dan mengembangkan program baru.
- b. Penyelesai gangguan yang bertanggung jawab atas tindakan korektif bila organisasi menghadapi gangguan.
- c. Pengalokasi sumber daya yang membuat atau menyetujui keputusan - keputusan organisasi serta bertanggung jawab atas alokasi sumber daya organisasi.
- d. Perunding yang bertanggung jawab mewakili organisasi melakukan perundingan - perundingan untuk kepentingan pengembangan organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis juga mengartikan bahwa peran merupakan suatu pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan perilaku sosialnya yang bersifat formal dan informal dalam menjalankan sebuah organisasi yang ingin di capai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepala desa menurut Soekanto (2009) yaitu:

1. Faktor pendukung, faktor ini meliputi:

- a) Keturunan yang dimaksud disini adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik sehingga ia bisa memperoleh pengakuan masyarakat akan keberadaannya dalam masyarakat.
- b) Kewibawaan adalah sebagai kekuatan yang terpancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya.

- c) Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

2. Faktor penghambat, faktor ini meliputi:

- a. Kondisi penduduk adalah kondisi penduduk yang beraneka-ragam.
- b. Partisipasi penduduk adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam program pemberdayaan.
- c. Fasilitas atau peralatan yaitu yang dapat menunjang lancarnya kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.
- d. Partisipasi penduduk adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam program pemberdayaan.
- e. Fasilitas atau peralatan yaitu yang dapat menunjang lancarnya kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan.

Peranan (Dahlan, 1999:5) berasal dari kata peran. Peran mempunyai arti perilaku atau, pemain atau bertindak. Sedangkan peranan mempunyai arti fungsi, kedudukan atau bagian kedudukan. Selanjutnya Siagian (1981:21) mengemukakan bahwa “Peranan adalah tempat tertentu yang ditentukan untuk diduduki oleh seseorang dalam suatu proses pencapaian tujuan. Sedangkan pembangunan menurut Siagian (2000 : 15) adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). Pendapat lain dikemukakan oleh Todaro

(2000 : 20) bahwa “Pembangunan adalah proses multi dimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolute.

2.1.4 Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebut dalam Pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian desa.
4. Memlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
6. Mewakili desa nya di dalam dan di luar peradilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
7. Mengajukan perencanaan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan peraturan desa.
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat tersebut, maka sangat di perlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya.

Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan-kelebihan antara lain sebagai berikut :

1. Kelebihan dalam penggunaan pikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat tujuan dan lembaga (desa) yang dipimpinnya, pengetahuan tentang keluhuran asas-asas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien dan profesional sehingga tercapai hasil yang maksimal.
2. Kelebihan dalam rohanilah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh konkret dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memerhatikan masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain pengertian

Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.1.5 Teori Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang peruntukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut S.P Siagian, Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (S.P. Siagian 2005). Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (S.P. Siagian : 2012).

Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan gorong-gorong.

2.1.6 Teori Infrastruktur

Kemudian berbicara tentang pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi, (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya ketersediaan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, transportasi, jembatan, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para masyarakat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, karena apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan

tentunya akan lebih mahal dibanding dengan yang lain Sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif. Peran infrastruktur sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi sangat penting. Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak ada akan memberikan dampak yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan akan merusak alam yang pada hakikatnya akan merugikan manusia termasuk makhluk hidup yang lain. Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung sistem sosial dan sistem ekonomi, maka infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti dengan jelas, terutama bagi penentu atau pembuat kebijakan. Untuk dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik hendaknya dengan memperhatikan berbagai aspek seperti yang dijelaskan diatas oleh para ahli.

Jenis Infrastruktur ekonomi dan sosial mencakup antara lain :

1. Infrastruktur transportasi.
2. Infrastruktur jalan.
3. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
4. Infrastruktur fasilitas pendidikan.
5. Infrastruktur kesehatan.
6. Infrastruktur ibadah.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (Studi Di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu).

Kota merupakan komponen penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran kota ini sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia disiarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemajuan kerangka jalan pada saat ini membuat pendudukan wilayah pembangunan dalam jangka menengah dan panjang akan menjunjung perluasan kemampuan dan efisiensi bidang keuangan, dengan Tujuannya agar kemajuan pondasi jalan dapat dianggap sebagai metodologi untuk bekerja pada kualitas, pelatihan, pengembangan keuangan, pekerjaan pada kepuasan pribadi dan peningkatan ketebalan produk. Tujuan 1. Mengetahui komitmen penyelesaian program pembangunan jalan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. 2. Menentukan faktor pendukung dan

penghambat dalam pelaksanaan perbaikan di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Berbagai prosedur, untuk lebih spesifik: persepsi, pertemuan dan dokumentasi yang berhubungan dengan informasi penelitian juga menarik dilihat dari hasil eksplorasi 1. Kelangsungan pelaksanaan program peningkatan kerangka provinsi dilihat dari tanda-tanda tercapainya tujuan: Dalam petunjuk-petunjuk untuk mencapai tujuan, ada dua sub-penanda yang harus dilihat yang mana chunking yang sesuai jadwal dan tepat atau akurat. 2. Kecukupan pelaksanaan program kemajuan kerangka negara dilihat dari penanda bauran: Dari penemuan-penemuan tersebut cenderung terlihat bahwa sebelum dilaksanakannya program pembangunan rustic framework di kota, pada awalnya dikaitkan dengan lingkungan sekitar melalui town gathering/villa gathering, pelaksanaan sosialisasi telah selesai secara tepat dan tepat serta daerah juga sangat tertarik untuk mengingat program untuk perbaikan kota dan juga untuk kemajuan kota Torongrejo.

2. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memotivasi, memberikan prasarana sarana, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa berupa jalan keperkebunan dan

untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan teknik kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis yang digunakan menurut M.Ali (1987) Analisis data dengan Teknik Pengumpulan Data, yaitu dengan Kuesioner/angket, Observasi, Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Lasung Batu berupa jalan keperkebunan Cukup Berperan atau 47,43%. Faktor penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yaitu kurangnya Dorongan-dorongan.

3. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

Tujuan penelitian adalah mengetahui Peranan Pemerintah Desa Malitu Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malitu belum berperan secara efektif, khususnya pengawasan. Hal ini dilihat dari hasil

yang sudah ada bahwa adanya jalan kantong produksi yang tidak selesai dikerjakan. Sedangkan, faktor – faktor yang mempengaruhi peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah terbatasnya sarana komunikasi dan sumber daya manusia atau SDM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam bidang perencanaan, peran pemerintah Desa Malitu sudah berperan secara aktif. Dalam proses pelaksanaan belum berjalan dengan baik dan dalam bidang pengawasan, pemerintah Desa Malitu, belum melakukan pengawasan secara optimal.

4. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Fisik Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono. M.Si dan Pembimbing II : Agus Setio Widodo. M.Si Penelitian ini bertujuan ingin mendeskripsikan peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan dan juga ingin mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghambat serta solusi kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas tentang peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di

kecamatan kesesi kabupaten pekalongan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Suharto (2006:32). Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan fisik di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan berjalan dengan baik dan lancar tetapi ada aspek yang perlu diperbaiki. Selain itu juga ada beberapa hambatan yaitu sebagai berikut: a. bentuk uang swadaya, masyarakat permohonan bahwa sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang sangat besar dan bantuan dari dewanb. Masyarakat belum bisa untuk menjaga dan memelihara dari pembangunan yang sudah ada c. Sarana prasarana ekonomi di mana setiap desa belum memiliki pasar desa dan bank desa d. Kemudian untuk desa watupayung dan srinahan belum memiliki desa poliklinik. Kata Kunci : Peran kepala desa, Partisipasi, pembangunan.

5. Analisis Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur “Desa Pakning Asal” Kabupaten Bengkalis.

Peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal dan kendala apa saja yang dihadapi kepala Desa Pakning Asal dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpulkan dari

lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi terhadap sejumlah informan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pakning Asal dilihat dari aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pengawasan sudah sangat baik. Untuk faktor penghambat infrastruktur pembangunan yaitu adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah dan hambatan lain yaitu cuaca peran kepala desa pada indikator perencanaan pembangunan desa sudah baik karena pemerintah desa melibatkan tokoh-tokoh nasyaarakat desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Dalam pelaksanaan peran kepala desa juga dikatakan baik dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang berlaku. Pada pengaawasan peran kepala desa juga di katakan baik di karenakan kepala desa serta BPD melakukan pengawasan secara bersama dalam melaksanakan program-program pembangunan desa. Diharapkan pemerintahan desa untuk lebih transparan terkait perilaku dan anggaran yang dikeluarkan pada pembangunan infrastruktur desa. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasan dan pembinaan infrastruktur desa. Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Pembangunan Infrastruktur.

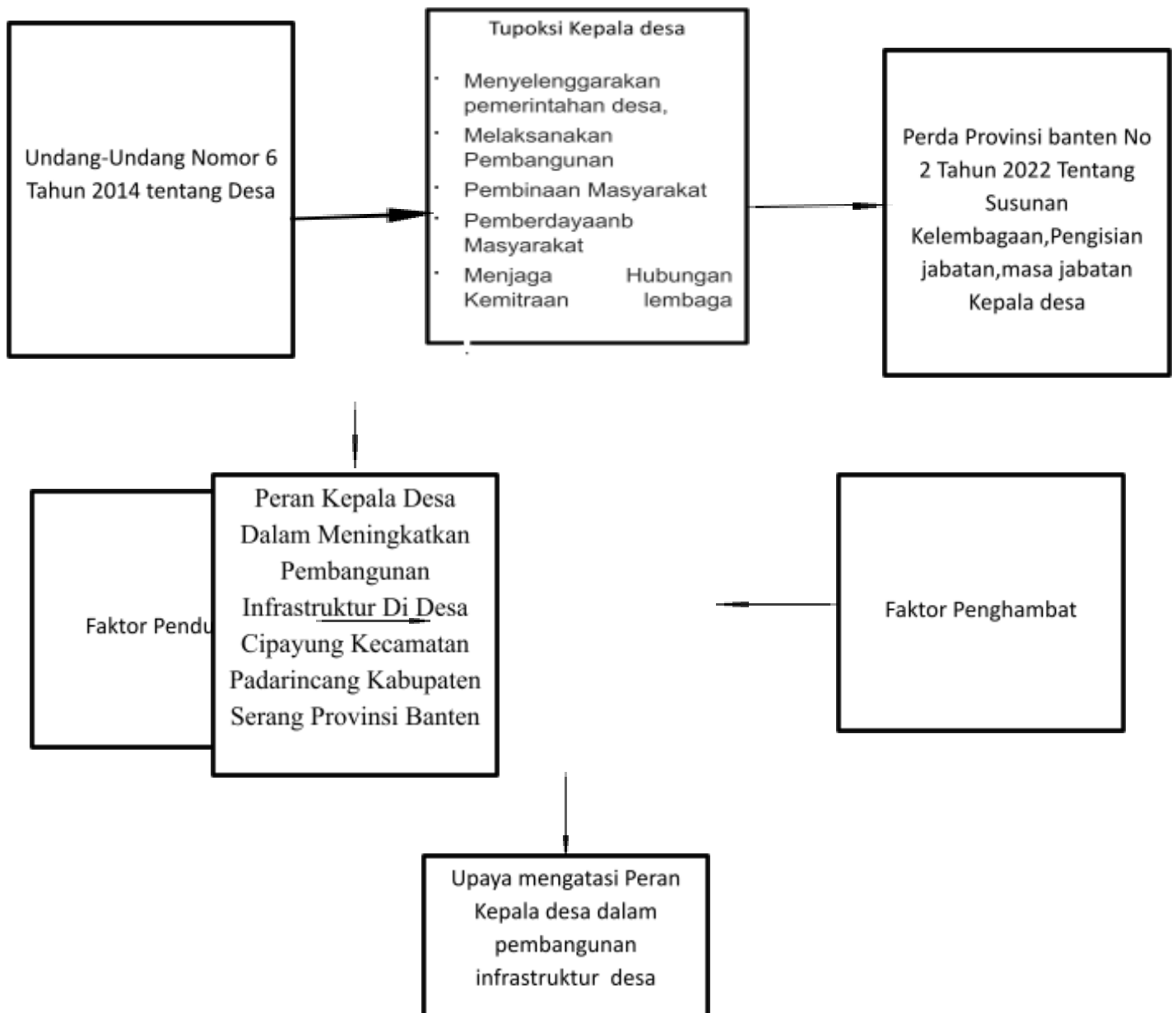
2.3. Kerangka Pemikiran dan Operasionalisasi Konsep

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁴ Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan usulan teori yang akan dipergunakan dalam meneliti dan menganalisa Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten , maka dirumuskan suatu alur pemikiran yang merupakan kerangka pemikiran penelitian.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



2.3.2 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
----------	---------	-----------

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Teori Peran (Soekanto,2009)	1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat pada organisasi 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur social masyarakat
---	---	--

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Berdasarkan hal-hal di atas yang telah diuraikan hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Desa Cipayung memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur Di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2018 – 2019.
2. Adanya faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peran Kepala Desa Cipayung dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2018 – 2019.
3. Adanya upaya yang dilakukan oleh kepala Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan yang ada di desa tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sifat data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan peran Kepala Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dan perilaku seseorang yang diamati. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh berupa informasi, keterangan dan berupa hasil pengamatan. Hasil pengamatan pada penelitian kualitatif tidak disajikan dalam bentuk numerik, melainkan dalam bentuk kata – kata sesuai dengan karakteristik dari pendekatan kualitatif hingga diperoleh pemahaman – pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas tentang pengamatan dibalik informasi selama berinteraksi di lapangan. Menurut Moleong (2011:34)

3.2. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan hasil penjajakan awal yang dilakukan, peneliti menunjukkan bahwa sangat diperlukan peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa peran seorang kepala desa belum sepenuhnya berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Gambar 2.2 Peta Lokasi Desa Cipayung Kecamatan Padarincang



3.2.2. Jadwal Penelitian

Tabel 2.2 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022										Tahun 2023							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembagian SK Bimbingan																		
2	Bimbingan Penyusunan Skripsi																		
3	Penyusunan Usulan Penelitian																		
4	Sidang Usulan Penelitian																		
5	Revisi Usulan Penelitian dan Pengurusan Surat Izin Penelitian																		
6	Observasi Lapangan dan Penelitian																		
7	Penyusunan bab IV dan Bab V																		
8	Sidang Komprehensif																		
9	Perbaikan Skripsi																		
10	Wisuda Tahun 2023																		

Sumber: Diolah dari Kalender Akademik STIPAN 2021/2023



:Kegiatan

3..3 Latar/Setting Penelitian

Sumber data dalam pendekatan kualitatif adalah semua pihak yang berkepentingan dan pelaku utama baik dari Kepala Desa maupun pihak masyarakat, fakta yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diinginkan meliputi peristiwa, kejadian, tindakan dan perilaku kerja Kepala Desa serta kualitas dalam upaya meningkatkan kinerja di desa. Informasi itu diperoleh melalui proses wawancara dan pengalaman mendalam. Tujuan terpilihnya penelitian ini adalah untuk mendapatkan fakta penghambat yang gaya informasi dan memilih orang yang memungkinkan penulisan mempelajari beberapa hal yang sentral. Dengan demikian informasi berada disemua lapisan masyarakat serta berbagai lapisan fenomena yang diteliti sehingga informasi akhirnya terseleksi informasi yang baik yang memenuhi syarat informasi yakni yang menyampaikan data adanya, kejujuran, enak berbicara, dan dapat berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab, dan memahami objek penelitian, menguasai informasi maupun membagikan pengetahuannya.

Jumlah informan yang dibutuhkan dengan memperhatikan apa yang ingin diketahui sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ridwan (2010:51). Teknik pengumpulan data merupakan sebagai teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan.

3.4.1 Teknik Observasi

Menurut Muhammad Ilyas Ismail dalam buku *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur* (2020), observasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik dibanding teknik lainnya.

Menurut Walidjo dalam *Teknik Observasi (Kapita Selekta Metodologi Penelitian)* (2020)), observasi mempunyai empat ciri penting yaitu:

1. Observasi mempunyai sasaran yang khusus

Artinya observasi dilakukan untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan oleh observer (orang yang melakukan observasi).

2. Observasi dilakukan secara sistematis

Artinya observasi dilakukan dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan mempunyai prosedur. Agar dalam penerapannya, observasi dapat berjalan dengan baik.

3. Observasi membutuhkan pencatatan dengan segera

Artinya segala detail kecil yang ditemui dalam proses observasi harus sesegera mungkin dicatat agar tidak lupa dan demi menghindari hilangnya informasi penting.

4. Observasi membutuhkan keahlian

Artinya observasi membutuhkan keahlian dari observer, misalnya bagaimana memperhatikan, melakukan proses pengamatan, ketelitian, dan lain sebagainya.

Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi dan mengamati. kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut dan didokumentasikan sebagai hasil observasi.

3.4.2 Teknik Wawancara

Wawancara (interview) menurut Kartini Kartono (1986:171) adalah “suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik”. Menurut Dexter (Lincoln dan Guba, 1985:268) wawancara adalah “percakapan yang bertujuan mendapatkan informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, kepedulian, dapat mengalami dunia pikiran dan perasaan responden”. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) yaitu antara lain: Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan oleh Patton (1980:197) yaitu:

- a) Wawancara pembicaraan informal Pada wawancara pembicaraan informal pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sehingga ketika kegiatan wawancara berlangsung terwawancara tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

- b) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara Pada wawancara pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.
- c) Wawancara baku terbuka Pada jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajian yang sama untuk setiap responden. Wawancara jenis ini bermanfaat apabila pewawancara hanya beberapa orang dan yang diwawancarai cukup banyak jumlahnya.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan menggunakan teknik wawancara diperoleh data secara akurat dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dalam penelitian ini.

Tabel 3.3 Daftar Informan

No	Nama	Jumlah Orang
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Perangkat Desa	3 Orang
3	Tokoh Masyarakat	3 Orang
4	Masyarakat Desa	3 Orang
5	Masyarakat Pengguna Jalan	2 Orang
6	Jumlah	12 Orang

3.4.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari sumber data-data tertulis dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan (Lexy J. Moleong, 2001:161) Mencari dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan pembinaan anak jalanan menjadi warga negara yang baik.

3.5 Teknik Analisis Data

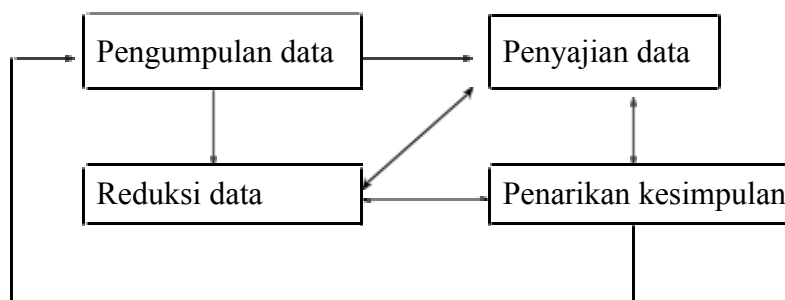
Teknik analisis data merupakan suatu tahap yang penting dan menentukan dalam analisis data penelitian kualitatif, menurut moleong (2004:280-281) “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Miles and Huberman (1992:16) yang mengatakan bahwa, “Terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, analisis data kualitatif Meliputi Reduksi Data, Display Data dan Kesimpulan”.

Berikut ini bagan mengenai komponen-komponen analisis data menurut Miles dan Huberman:

Gambar 3.3

Komponen Analisis Data



Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data yaitu, mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi Data yaitu, sebagai proses seleksi. Pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada dilapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data dengan demikian resduksi data dimulai sejak penelitian memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data yaitu, rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan yaitu, dengan pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun poal-pola pengarahana dan sebab akibat.

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Pada uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektivitas) (Sugiyono, 2019).

1. Credibility (Validitas Internal) Uji credibility (validitas internal) atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check (Sugiyono, 2019).

- a) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibalitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah di cek kembali ke lapanggan benar atau tidak, berubah atau tidak. Pada saat setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri (Sugiyono, 2019).

- b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, sehingga kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat dicatat dengan direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan ketekunan merupakan salah satu cara mengontrol pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, 44 dibuat, dan disajikan sudah benar atau tidak. Cara peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti (Sugiyono, 2019).

- c) Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan

bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

d) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi artinya adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Pada laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumentasi autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

e) Member Check

Member Check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau narasumber (Sugiyono, 2019).

2. Transferability (Validitas Eksternal)

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pada saat penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan, dimana bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai (Sugiyono, 2019).

3. Dependability (Reabilitas)

Dependability atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau realibilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula (Sugiyono, 2019).

4. Confirmability (Obyektivitas)

Obyektivitas dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability (Sugiyono, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, agar lebih terarah dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi para masyarakat tentang peran Kepala Desa

Cipayung Kecamatan Padarincang Serang – Banten terhadap pembangunan infrastruktur jalan di desa.

Teknik pemerikasa keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Trianggulasi, bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus mengujikredibilitas data, atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan dengan menguji keabsahan data dengan .

Menurut wiersma (1986) “mengatakan trianggulasi dalam pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber”. “Dengan demikian terdapat Trianggulasi Sumber, Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data Dan Trianggulasi Waktu”. (Sugiyono 2007:273).

1. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, seperti dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari semua sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan semua sumber data tersebut (Sugiyono, 2019).

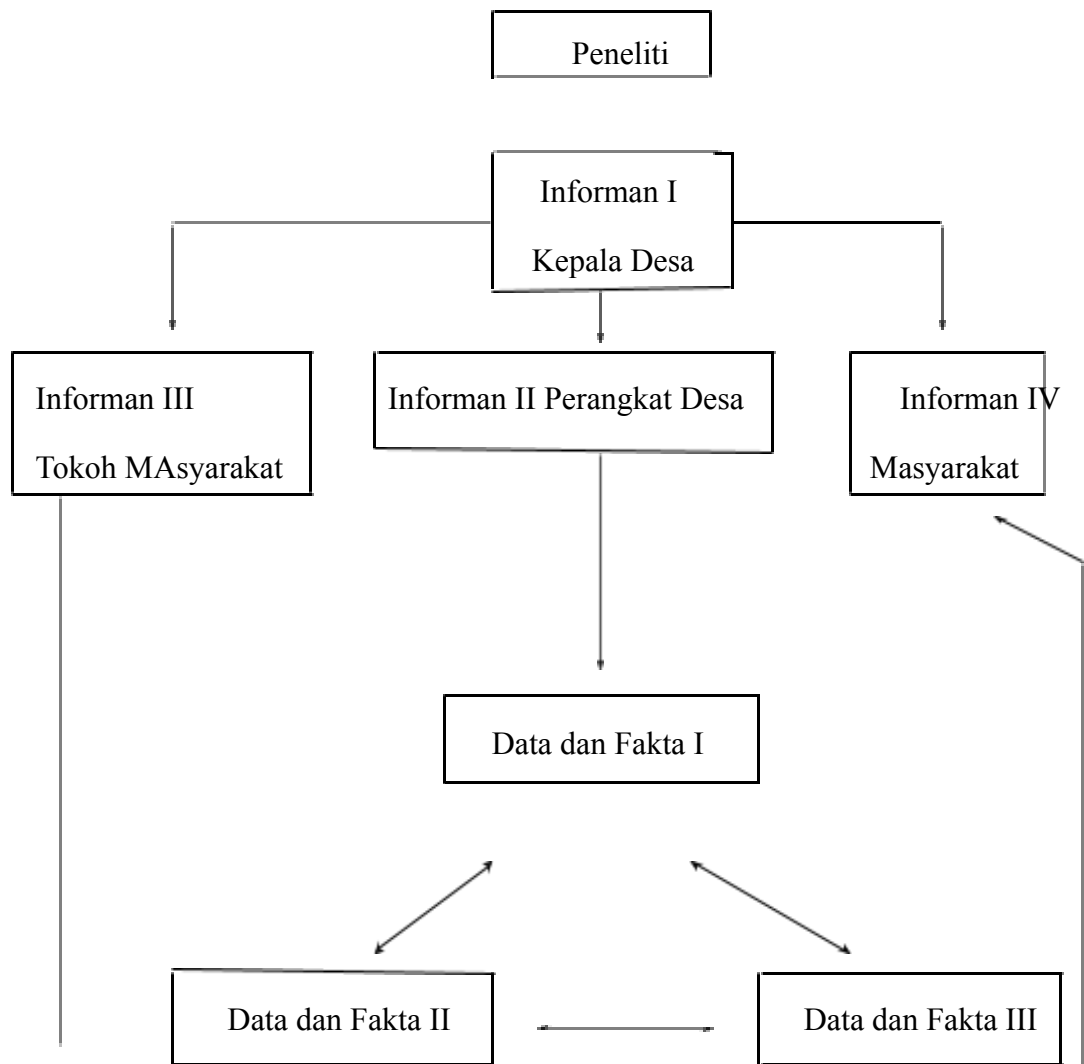
2. Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada data yang diperoleh misalnya melalui wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner (Sugiyono, 2019).

3. Trianggulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pada rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2019).

Gambar 3.4
Trianggulasi



Sumber Sugiyono "Trianggulasi Teknik dan Sumber", 2014:84

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi

Sejarah Desa

Pada jaman dahulu yaitu sebelum tahun 1986 Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang merupakan pecahan dari desa barugbug. Pada saat pemekaran Desa Cipayung dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Ace dan selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah Desa Cipayung dipimpin beberapa Kepala Desa hingga tahun 2013 terpilihlah Ibu Tatu Rohilah sebagai Kepala Desa sampai sekarang.

Adapun pejabat Kepala Desa Cipayung mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut:

Tahun 1986-1993 Bapak Ace Sebagai Kepala Desa.

Tahun 1993-2003 H. Alawi Supriyadi Sebagai Kepala Desa.

Tahun 2003-2008 TB. Rois Sebagai Kepala Desa.

Tahun 2008-2013 H. Alawi Supriyadi Sebagai Kepala Desa.

Tahun 2013-2019 Tatu Rohilah Sebagai Kepala Desa.

2. Sejarah Berdirinya Penggilingan Padi

Penggilingan padi atau pabrik beras di Kampung Cisaat Hilir terdapat 7 (Tujuh) penggilingan padi akan tetapi dari sekian banyaknya penggilingan padi penulis hanya meneliti 2 (Dua) dari 7 penggilingan padi yang ada di Kampung Cisaat Hilir karena semuanya memiliki sistem yang sama dan sejarah yang sama. Penggilingan padi didirikan karena di daerah tersebut, banyak warga yang berprofesi sebagai petani padi, oleh karena itu masih banyak petani-petani padi yang membutuhkan penggilingan padi atau pabrik beras untuk memenuhi kebutuhan petani padi pada dasarnya agar dapat terpenuhi.

Tahun ketahun petani di Kampung Cisaat Hilir semakin bertambah karena banyaknya pengangguran di desa tersebut, oleh karena itu pengangguran tersebut memilih untuk menjadi petani padi karena keuntungannya cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Dan perkembangan penggilingan padi di kampung tersebut sangat ramai di datangi oleh para petani, karena itu penggilingan padi di Kampung Cisaat Hilir terbilang banyak karena penghasilan dari penggilingan padi juga sangat lumayan.

Sekian banyaknya penggilingan padi yang ada sampai sekarang sangat dibutuhkan oleh para petani samapai saat ini, karena dengan adanya penggilingan padi yang banyak maka proses petani untuk mencapai hasil itu sangat cepat tidak menunggu dan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk menggiling padinya.

Kondisi Geografis Obyektif Penelitian

Kondisi Geografis Desa

Desa Cipayung merupakan salah satu desa di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memiliki luas 6,20 km². Secara Geografis Desa Cipayung berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Barugbug.

Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Barugbug dan Ciomas.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Cisaat dan Curuggoong.

Sebelah Barat, berbatsan dengan Desa Batukuwung.

Kondisi Geografis Penggilingan Padi

Penggilingan padi di Kampung Cisaat Hilir terdapat 7 (Tujuh) penggilingan padi diantaranya :

Sebelah barat berbatasan dengan pabrik beras milik Pak Toha dan Pak Kemi.

Sebelah timur berbatasan dengan pabrik beras milik H. Edi dan H. Samsuri.

Sebelah utara berbatasan dengan pabrik beras milik Pak Udin dan Pak Rudin dan Pak Juma.

Kondisi Demografis Obyektif Penelitian

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Cipayung

A. Penduduk dan keluarga

Penduduk laki-laki : 2.340 Orang

Penduduk perempuan : 2.172 Orang

Jumlah keluarga : 1.215 Orang

Lembaga Ekonomi

Tabel 1.1 Lembaga Ekonomi

No	Jenis	Jumlah
1	Toko Material/Bangunan	1
2	Warung Kelontong	12
3	Pasar	-
4	Peternakan	2
5	Penggilingan Padi	7
6	Toko	4
7	Jasa Angkutan	2

Sumber : Buku Arsip Desa

Dilihat dari tabel 1.1. Sarana ekonomi yang terdapat di Kelurahan Cipayung banyak ragamnya, dari penggilingan padi itu sudah ada 7 tempat penggilingan dan lain sebagainya yang sudah tertera di tabel 1.1, jadi bisa terbilang berkembang prekonomiannya.

Lembaga Pendidikan

Tabel 1.2 Lembaga Pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	TK/Play Grup	2
2	SD/Sederajat	4
3	SLTP/Sederajat	-
4	SLTA/Sederajat	-

Sumber : Buku Arsip Desa

Dilhat dari tabel 1.2. Sarana pendidikan di kelurahan Cipayung ada kekurangan yang sangat memperhatikan. Kelurahan Cipayung tidak memiliki sarana pendidikan yang memadai untuk mengajarkan anak-anak dalam hal agama, contoh Madrasah Ibtidaiyah mislanya. Padahal kelurahan Cipayung memiliki banyak orang yang berpotensi dalam hal pendidikan

Jumlah Penduduk Tingkatan Pendidikan

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Tingkatan Pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1	Sarjana	97 Orang
2	SLTA	678 Orang
3	SLTP	137 Orang
4	SD	1770 Orang
5	Tidak menyelesaikan pendidikan	1830 Orang

Sumber : Buku Arsip Desa

Dilihat dari tabel 1.3. Tingkat pendidikan di Kelurahan Cipayung sangat memprihatin karena jumlah orang yang tidak menyelesaikan pendidikannya itu lebih banyak di bandingkan yang berpendidikan.

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Islam : 4512 Orang

Kristen: -

Katholik : -

Hindu : -

Budha : -

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

TNI/Polri	: 3 Orang
PNS	: 24 Orang
Wiraswasta/ pedagang	: 276 Orang
Petani	: 665 Orang
Pertukangan	: 34 Orang
Buruh tani	: 1030 Orang
Nelayan	: -
Jasa	: 67 Orang
Karyawan industri	: 250
Guru honorer	: 80 Orang

Kondisi sebagian besar desa cipayung bekerja di sektor pertanian dan buruh tani. Hal ini di dukung oleh faktor iklim dan kondisi lahan pertanian yang luas terdiri dari persawahan dan ladang dan juga hampir sebagian besar penduduk di sana memanfaatkan lahan pertanian mereka menjadi mata pencaharian.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus di jalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan

untuk berinteraksi. Menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dalam peranan terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam sebuah kepemimpinan khususnya dalam sebuah daerah, dalam hal ini adalah kepala desa tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun desanya yang mana masyarakat telah memberikan amanah untuk menjadikan daerah tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan.

1. Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat

daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun rencana/ agenda dari kepala Desa Cipayung sendiri selama masa jabatannya pembangunan infrastruktur jalan merupakan program prioritas desa tersebut dikarenakan sangat minimnya fasilitas jalan yang ada di Desa Cipayung sendiri, serta pembangunan yang lainnya yakni membangun irigasi bagi masyarakat tani yang memiliki anggaran yang cukup besar.

Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekertaris Desa, KAUR Keuangan Desa, ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Cipaung, Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai, dalam penyusunan RPJM desa melibatkan seluruh unsur masyarakat atau tidak, melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) yang mengatakan bahwa:

“..tentu kita dalam Rencana pembangunan jangka menengah desa kami melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari masyarakat, aparat kepolisian, aparat TNI serta tokoh adat, tokoh agama kita undang semua datang mengadakan pertemuan di balai desa untuk

mendengar aspirasi masyarakat dalam pembangunan..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..iye dalam pembuatan RPJM memang selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, semua lapisan. Kita selalu ada musyawarah bersama dengan seluruh staf dan masyarakat mengenai apa saja kebutuhannya masyarakat desa yang mendesak..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas mengatakan bahwasannya pemerintah desa dalam melakukan rencana penyusunan pembangunan jangka menengah selalu melibatkan masyarakat kemudian hampir senada dengan yang dikatakan oleh PN selaku (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“..iya dek kita melibatkan masyarakat, bermusyawarah, tokoh adat, tokoh agama, kantibnas, babinsa kita undang, dan kepala dusun dan warganya untuk mewakili keseluruhan masyarakat..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“semua tokoh terlibat pemerintah desa, BPD, masyarakat semua terlibat untuk menyusun rencana pembangunan..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama masyarakat AD, SI dan NL yang mengatakan bahwa:

“..memang pak desa biasa mengadakan pertemuan dengan masyarakat, saya juga sempat bersama pak dusun mengikuti rencana pembangunan desa, melakukan diskusi dan bertanya apa saja yang dibutuhkan masyarakat di lingkungan ini..” (..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..kalau itu saya kurang tahu dek, karena sayakan sibuk bertani disawah, belum punya waktu untuk bergabung dengan yang lain untuk kumpul-kumpul di kantor desa..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..iya dek, kalau untuk rencana pembangunan memang selalu ada pertemuan, desa memaparkan apa yang mereka ingin lakukan sama kalau ada saran dari masyarakat..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya

dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, serta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecaatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai perencanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman pembuatan rencana pembangunan desa. melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..pasti dek, kami melakukan RPJM berdasarkan pedoman yang ada sesuai dengan peraturan, seperti kita membuat ini RPJM berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan segala unsur yang ada di desa..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..iye kita berdasarkan pedoman penyusunan RPJM Cuma bedanya ya kita tidak pake team yg menangani secara khusus karena kita juga kekurangan tenaga dan orang jadi yang menangani tetap di staf desa..”

Berdasarkan wawancara diatas mengatakan bahwasannya perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Selanjutnya wawancara dilakukan bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..setau saya iya karena RPJM ini ada agendanya mulai dari

penyusunan sampai penetapan kemudian ada peninjauan ulang lagi..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..yang mengurus semua urusan pemerintah desa, dan memang sudah seharusnya mengikuti pedoman pembuatan RPJM, jadi seharusnya harus ikut pedomankan..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama masyarakat yakni AD, SI dan NL mengenai penyusunan rencana pembangunan desa berdasarkan pedoman dan ketentuan yang telah diatur, dan mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau dek dilakukan berdasarkan pedoman, dan ketetapannya atau tidak, karena sayapun kurang paham tentang tata caranya itu, yang saya tau kita semua bermusyawarah saja berembuk saling tukar pikiran..”

“..saya tidak tau dek, karena saya ikut dalam pertemuan saja itu sangat jarang sekali..”

“..menurut saya pastilah mereka bekerja sesuai dengan berdasarkan pedoman kerja, mereka pasti ada acuan sehingga mereka membuat kegiatan seperti ini..”

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketentuan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayunng Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai, kepuasan masyarakat berdasarkan

RPJM yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..untuk kepuasan masyarakat saya kurang tau pasti, tapikan kami sudah mendengar aspirasinya di wakili oleh beberapa masyarakat beserta kepala dusun/lingkungan jadi kami menyerap semua aspirasi, walaupun ada ketidak puasan ya karena kita memprioritaskan kebutuhan..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..saya yakin pasti tetap ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil penyusunan perencanaan pembangunan ini karena tidak semua kita setuju, ada beberapa hal yang menurut kami dan yang lain masih belum perlu pembangunannya..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas mengenai tingkat kepuasan masyarakat mengenai hasil dari rencana penyusunan pembangunan infrastruktur desa, yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara oleh PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau juga dengan kepuasan masyarakat tapi sejauh ini belum ada komentar mengenai pembangunan yang dilakukan pemerintah desa jadi saya pikir tidak ada masalah mengenai kepuasan masyarakat..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..menurut saya beda-beda tingkat kepuasannya masyarakat karena pasti keinginannya mereka beda, ada yang sudah puas dan saya yakin juga ada yang belum merapa puas dengan RPJM ini..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat mengenai kepuasannya dalam tindak lanjut pembangunan yang telah disetujui oleh pemerintah desa. yakni AD,

SI dan NL mengatakan bahwa:

“...walaupun memang ada beberapa aspirasi dari kami yang tidak di setuju namun saya sendiripun tidak masalah, karena saya sendiri pun paham mana saja yang dilakukan pembangunan dulu..” (hasil wawancara hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..kalau saya sendiri pembangunan irigasi pertanian kalau sudah aman, saya tidak masalah kenapa karena masyarakat di sini memang kebanyakan petani jadi infastruktur itu harus bagus.” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..jalan di desa ini memang masih sangat kurang, sering ada yang jatuh seharusnya menjadi prioritas tapi kalau memang yang lain lebih penting saya sendiri paham dan maklum dengan kondisi desa ini yang sangat jauh..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum terkait denga prioriras pembangunan yang layak di dahulukan.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai, bagaimana pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat. Melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..kami mengundang seluruh lapisan masyarakat diwakili oleh beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh yang dituakan,

serta aparat kantibnas dan babinsa untuk melakukan musyawarah diskusi dua arah mengenai pembangunan desa..” ((hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..kami melakukan tudang sipulung dengan tokoh-tokoh masyarakat diskusi bersama mengenai pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyrakat desa dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor desa itu sendiri. Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..kami selalu melakukan musyawarah kepada masyarakat, apa lagi membicarakan tentang rencana pembangunan desa, kami selalu melakukan musyawarah. Pemerintah tdak boleh seenaknya menetapkan pembangunan tanpa musyawarah dari lapisan masyrakat..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..rencana pembangunannya seperti biasa, diadakan musrawarah dengan masyarakat, tokoh yang berkepentingan semua kita bicarakan dengan baik..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya wawancara yang dilakukan bersama masyarakat AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..kami di undang hadir datang berdiskusi dengan aparat pemerintah desa mengenai apa saja pembangunan yang akan dilakukan..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..biasanya kalau ada apa-apa pasti ada pertemuan di kantor desa, mau itu masalah pembangunan dan sebagainya..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..kita menyusun rencana pembangunan ya di balai desa bersama aparat desa, dan masyarakat yang terlibat..” (hasil

wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor desa bersama masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

Berdasarkan indikator Perencanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai, program-program prioritas pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa kariago. Melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..kami memiliki banyak program pembangunan desa, seperti pembangunan pemerataan infrastruktur jalanan, yang mana kita liat sendiri jalanan di sini tidak bisa di akses dengan kendaraan roda empat, kemudian masyarakat di sini juga masih kekurangan MCK jadi banyak program tapi belum semua kita mampu jalankan sekaligus..” (hasil wawancaea 25 Juli 2023)

“..ada beberapa program yang menjadi acuannya pemerintah desa, tapi kita untuk saat ini fokus ke pembangunan jalanan, karena di desa ini masih kurang sekali akses jalanan yang di miliki..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Berdasaarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwasannya desa memiliki banyak program pembangunan sedangkan prioritas pembangunan desa Cipayung yakni akses jalanan serta pemerataan infrastuktur jalanan yang masih sangat kurang dan di bawah rata-rata. Kemudian selanjutnya wawancara dilakukan bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..sebenarnya banyak pembangunan yang harus dilakukan oleh desa Cipayung ini namun, dengan keterbatasan dana tidak bisa dilakukan sekaligus apa lagi pembangunan infrastruktur jalanan ini biayanya tidak sedikit jadi untuk memudahkan masyarakat prioritas pembangunan sekarang itu pemerataan jalanan..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..program prioritas pemerintah desa saat ini jalanan yang sangat dibutuhkan, karena jalanan ini menjadi akses pembangun ekonomi masyarakat..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya melalui wawancara yang dilakukan bersama beberapa masyarakat AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..setau saya program prioritasnya pemerintah desa sekarang ini itu jalanan, karena kami juga masyarakat sangat berharap pemerataan jalan ini yang susah sekali..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..saya kurang tau dek apa saja programnya pemerintah desa mengenai pembangunan..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..saat ini yang saya liat pemerintah desa memang sedang berusaha memperbaiki jalanan desa..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Berdasarkan keseluruhan wawancara diatas pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. dan mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham

mengenai adanya pedoman dan ketentuan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa. adapun tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat di tindak lanjutkan, melainkan pembangunan infrastruktur di tindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, sedangkan masyarakat sendiri paham dan maklum terkait denga prioriras pembangunan yang layak di dahulukan. pemerintah desa melakukan rencana pembangunan desa bersama masyarakat itu dengan bentuk diskusi dua arah secara formal dengan musyawarah dilakukan di kantor desa bersama masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan rencana pembangunan desa di desa Cipayung kecamatan Padarincang kabupaten Serang. sedangkan prioritas pembangunan desa Cipayung yakni akses jalan dan pemerataan infrastuktur jalan yang masih sangat kurang dan di bawah rata-rata.

2. Pelaksanaan

Kepala Desa mengokordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung

sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan KAUR Keuangan Desa, Ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Cipayung Kecamatan Padarincanng Kabupaten Serang.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Cipayung Kecamatan

Padarincanng Kabupaten Serang. mengenai, proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan. Melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..untuk menetapkan pelaksana kegiatan itu kami gunakan orang disini, ikut dalam penyusunan rencana pembangunan desa kemarin, yang paham dan memiliki kemampuan yang mumpuni dan tidak diluar desa ini sendiri..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..penetapan pelaksanaan itu dilakukan oleh bapak kepala desa, mempertimbangkan beberapa indikator seperti paham akan tugas sebagai pelaksana pembangunan, kemudian bukan orang dari luar desa supaya lebih mudah untuk di kontrol, selebihnya tergantung kepala desa..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas bahwasannya proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan desa Cipayung .Kemudian selanjutnya wawancara bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..untuk pelaksana kegiatan pembangunan itu pak kepala desa yang tunjuk, biasanya juga orang-orang dekat yang dipercayakan bahkan aparat desa sendiri juga agar lebih mudah untuk mengontrol proses pelaksanaan pembangunan desa..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..pelaksana itu dari desa, kami di BPD ini hanya bertugas sebagai pengawas saja tidak ikut dalam penetapan pelaksana pembangunan..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa

masyarakat mengenai proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur desa kariago yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“...saya tidak tau dek untuk urusan penetapan seperti itu, karena biasanya memang sudah ada dan sudah ditunjuk baik itu dari kantor desa ataupun pak desa langsung..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..tidak tau dan tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..masyarakat tidak dilibatkan jadi kami masyarakat tidak paham untuk proses penetapan pelaksana kegiatan pembangunan..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasannya proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan desa kariago. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai, proses penyusunan rencana kerja pelaksana pembangunan dan apa saja yang menjadi fokus pada rencana kerja tersebut, melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..dalam kegiatan penyusunan rencana kerja itu kami diskusikan apa saja yang akan dikerjakan, berapa biaya

yang harus dikeluarkan pembangunan tersebut, lokasi mana saja yang akan dilakukan pembangunan dan tenaga kerja yang digunakan dalam pembangunan demikian..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..dalam kegiatan penyusunan rencana kerja kami banyak membahas tata pelaksana pembangunan mulai dari biaya hingga tenaga kerja serta daftar pelaksana kegiatan semua kami bahas, untuk membuat kegiatan jelas dan terarah..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan desa Cipaung, selanjutnya wawancara dilakukan bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) yang mengatakan:

“..ya itu kita rencanakan semua kegiatan yang akan dilakukan, daftar- daftar kegiatan apa saja, kemudian bagaimana prosesnya, selanjutnya untuk fokus mungkin lebih ke biaya, karena pembangunan kita harus berdasarkan biaya yang menjadi penentu pembangunan itu seberapa besar pembangunan yang akan dibuat..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..dalam proses ini semuanya dibahas secara detail baik koordinasi pelaksana dengan pengawas, kemudian dari rincian biaya dan semuanya diproses semua disini..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan kerja yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..saya sendiri kurang tau, masyarakat juga tidak dilibatkan dalam proses ini..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..tidak tau dek..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..mungkin masyarakat hanya dilibatkan dalam proses rencana penyusunan pembangunan saja, kalau pelaksanaan tidak, lagi pula kan sudah ada yang paham..”
(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan desa kariago kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan desa Cipayung dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan. Namun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai cara pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi dokumen hasil rencana kerja pelaksanaan pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat desa, dalam wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..untuk sosialisasi ini kita lakukan melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan, dalam pertemuan desa bersama kepala dusun kemudian dusun ditugaskan untuk menginformasikan lingkungannya terhadap pembangunan yang dilakukan, kemudian juga dari musyawarah kelompok-kelompok yang ada di desa, kelompok tani dan sebagainya, kemudian kita juga paparkan pada papan informasi dan baliho desa kegiatan dan biaya semua lengkap jadi siapa saja yang lewat bisa melihat..”

“..kita ada baliho didepan kantor yang sangat besar semuanya jelas mengenai pembangunan dan kegiatan yang akan dilaksanakan bersama rincian biayanya jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait keterbukaan pemerintah desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya sosialisasi terkait dengan rencana kerja pelaksanaan pembangunan dan kegiatan desa di informasikan melalui pertemuan, dan musyawarah yang dilakukan baik itu kelompok maupun musyawarah lingkungan serta adanya papan informasi dan baliho yang disediakan dengan rincian kegiatan dan pembiayaan. Kemudian wawancara bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..kalau untuk sosialisasi itu kita memang siapkan, karena bentuk transparansinya desa dan memang sudah wajib untuk bikin laporan bentuk baliho..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..sosialisasi-sosialisasi banyak caralah, termasuk juga pemberitahuan ini sudah disiapkan di depan kantor desa sangat besar mengenai rincian kegiatan dan rincian biaya semua lengkap..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya wawancara dilakukan bersama beberapa masyarakat mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..iye kalau sosialisasi ada memang pemberitahuan dari hasil musyawarah ada juga di dpan kantor desa baliho informasi kegiatan- kegiatan semuanya..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..saya jarang ikut musyawarah tapi untuk tau pembangunan saya tau, informasi sekarang sangat mudah tersebar..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..kalau untuk sosialisasi pemerintah desa, iye ada di kepala desa kalau ada kegiatan atau sekedar minum kopi sama-sama pasti selalu memberitahukan dibantu juga dengan papan informasi yang disediakan di depan kantor desa..”

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Cipayung melalui musyawarah- musyawarah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa kemudian juga desa Cipayung dilengkapi dengan informasi rencana pelaksanaan pembangunan di paparkan pada baliho yang dibuat oleh pemerintah desa agar terjalin keterbukaan pada pemerintah dan masyarakat desa.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cioaung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai pemerintah desa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja serta bahan material pada pembangunan infrastruktur jalan. Melalui wawancara bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..untuk pengadaan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur jalan kita serahkan ke ahlinya. kemudian kita menentukan bahan dan mendata berapa banyak, kemudian kita juga memanfaatkan sumberdaya masyarakat dalam bergotong royong bekerja sama..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..untuk pengadaan tenaga kerja memang sudah ada di siapkan karena kalau kita mau rekrut masyarakat ya tidak bisa karena pembangunan jalanan itu beda dengan bangun kantor atau bangunan yang lainnya..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja yakni memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumberdaya manusia desa dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan

kebutuhan. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..untuk pengadaan tenaga kerja sepertinya bekerja sama dengan kabupaten untuk pengadaan tenaga kerja infrastruktur jalanan karena tidak sembarang, klo materialnya sama juga..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..pengadaan tenaga kerja itu pemerintah desa dengan pelaksana yang urus, tapi saya liat karena jalanan yang dibangun tidak bisa sembarangan orang jadi yang memang pekerjaannya membangun jalanan kita serahkan ke ahlinya..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat terkait mengenai pengadaan tenaga kerja dan pengadaan material yakni AD, SI, dan NL yang mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau dek untuk pengadaan tenaga kerja dan materialnya karena tidak ada informasi soal yang pengandaan..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..tidak paham dek untuk hal seperti itu..”
(hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..untuk itu juga saya kurang tau karena mereka tidak menginformasikan sampai sedetail itu..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja yang berasal dan memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumberdaya manusia desa dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat tidak paham dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaan.

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan, pada peran kepala desa

dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG mengatakan bahwa:

“..partisipasi dari masyarakat desa sendiri alhamdulillah cukup baik, dengan menerima pembangunan dan mendukung pemerintah desa saya kira itu sudah sangat cukup untuk masyarakat berpartisipasi apa lagi ada bantuan dari masyarakat kami sangat senang..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..partisipasinya masyarakat terhadap pembangunan alhamdulillah sejauh ini baik..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwasannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“..partisipasi masyarakat alhamdulillah sangat antusias, mulai dari perencanaan penyusunan pembangunan desa, kemudian hingga pelaksanaan ini masyarakat membantu pemerintah desa dengan moral maupun moril..”(hasil wawancara 26 Jul 2023)

“..partisipasinya masyarakat ini sebenarnya tidak terlalu banyak ji untuk pelaksana pembangunan karena kan sudah ada mi ditentukan pekerjaanya..” (hasil wawancara 26 Julli 2023)

Kemudian dalam wawancara yang dilakukan bersama beberapa masyarakat desa terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan desa yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..bentuk partisipasi masyarakat yakni dengan memberikan saran, kritikan, bahkan juga ada membantu dalam pembangunan..” (hasil wawancara 2023)

“..walaupun saya sendiri kurang berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan desa, tapi saya berpartisipasi dengan mendukung dan kalau ada beberapa hal yang diperlukan pemerintah desa yang memang membutuhkan tenaga pasti saya dan masyarakat yang lain siap..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..alhamdulillah partisipasi masyarakat disini cukup tinggi untuk urusan pembangunan..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator pelaksanaan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan desa kariango. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Dan mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan desa kariango kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan desa kariango dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan.

Namun masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa

terkait rencana kerja pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Cipayung melalui musyawarah-musyawarah dan pertemuan yang diadakan oleh pemerintah desa kemudian juga desa kariago dilengkapi dengan informasi rencana pelaksanaan pembangunan di paparkan pada baliho yang dibuat oleh pemerintah desa agar terjalin keterbukaan pada pemerintah dan masyarakat desa. untuk melakukan pengadaan tenaga kerja yang berasal dan memang sudah ahli dalam infrastruktur pembuatan jalan, dan juga sumberdaya manusia desa dilibatkan untuk membantu pembangunan, dan untuk pengadaan barang di data dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat tidak paham dikarenakan keterbatasan informasi yang diberikan mengenai pengadaaan. Serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalanan desa baik dan mendukung penuh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Gambar 1
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Infrastruktur Desa Cipaunng



3. Pengawasan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekertaris Desa, KAUR Keuangan Desa, ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Cipayunng Kecamatan Padarincanng Kabupaten Serang.

Berdasarkan indikator Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung

Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai seperti apa pemerintah desa dalam melakukan pengawasan dan pengawasan pada pembangunan infrastruktur jalan, melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan:

“..pemerintah desa itu selalu mengontrol dan mengawasi langsung pembangunan, turun kelapangan bersama pekerja untuk mengecek seberapa persen tingkat penyelesaian dan memeriksa pembiayaan dan sebagainya..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..desa sebagai penanggung jawab tentunya harus memberikan pengawasan dan pengontrolan pembangunan yang ketat, untuk pembangunan hampir setiap hari ada pemeriksaaan dari pemerintah desa untuk mengontrol walaupun sudah ada yg bertugas..” (hasil wawancara 25 Julli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait mengenai seperti apa pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur jalanan desa, yakni dengan melakukan pegawasan dan pemantauan langsung dilapangan bersama pekerja. Kemudian wawancara selanjutnya bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..pemerintah desa melakukan pengawasan dan pemantauan itu secukupnya, karena kan pasti ada juga laporan yang masuk jadi tinggal disamakan saja apakah benar atau tidak ini..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan, jadi kordinasi BPD dengan desa itu menjadi hal yang sangat penting..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara bersama beberapa masyarakat desa mengenai seperti apa pengawasan dan pemantauan

pembangunan dari pemerintah desa yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..pengawasan dari pemerintah desa sendiri agak kurang memperhatikan mengenai pengerjaan jalanan..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..kurang tau saya dek, kurang memperhatikan biasanya kalau mau kesawah hanya pekerja saya liat tdak melihat aparat desa ada di sana..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..sebenarnya mereka memang melakukan pengawasan Cuma masih kurang karena pekerja biasa masih lepas tanpa pengawasan jadi pembangunan agak lambat..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan.

Berdasarkan indikator Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai, keterlibatan Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan. Melalui wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“...pasti karena BPD memang tugas dan fungsinya sebagai pengawas pembangunan oleh sebab itu pemerintah desa dan BPD melakukan kordiasi dan pembagian tugas dalam melakukan pemantauan dan pengawasan..”(hasil wawancara 25 Julil 2023)

“..memang sudah tugas dan fungsi BPD dalam melakukan

pengawasan dan pemantauan jadi sudah seharusnya untuk terlibat..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terkait mengenai keterlibatan dari badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur jalan di desa kariango yakni BPD memang terlibat dan menjadi kewajiban fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

“..BPD menjadi salah satu ujung tombak pengawasan dan pemantauan pembangunan yang ada di desa Cipayung ini. BPD berkordinasi bersama pemerintah desa dalam melaporkan jadian lapangan, jadi tidak perlu khawatir ketika pemerintah desa tidak datang mengawasi ada BPD yang merupakan tugas utamanya melakukan pengawasan.” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..keterlibatannya BPD ya pastilah, BPD kan tugas dan fungsinya memang mengadakan pengawasan dan pemantauan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Kemudian selanjutnya dilakukan beberapa wawancara yang dilakukan bersama masyarakat mengenai keterlibatan BPD pada pengawasan dan pemantauan infrastruktur jalan yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..saya kurang tau untuk itu dek, kalau pertemuan ketua BPD saya sering lihat, tapi untuk pengawasan dilapangan saya kurang tau..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..tidak tau dek..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..untuk keterlibatannya saya sendiri kurang tau..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalan

desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri.

Berdasarkan indikator Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai, partisipasi masyarakat desa mengenai pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur jalan desa, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..kalau untuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan sendiri saya kira masih kurang, mungkin karena mereka berpikir sudah ada yang bekerja kemudian di kontrol dengan mandor jadi tidak perlu lagi ada pengawasan, tapi ada juga beberapa masyarakat sadar akan pengawasan dan pemantauan..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan pemantauan masih agak kurang, masih kurang kesadaran akan hal tersebut..”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasannnya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur. Kemudian dilakukan wawancara bersama PN (KAUR keuangan) dan SN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..memang untuk partisipasi masyarakat masih belum terlalu peduli dengan pengawasan dan pemantauan..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..saya melihat masih kurang perhatian masyarakat terhadap pengawasan, pengontrolan, dan pemantauan pembangunan yang dilakukan pemerintah, jadi menurut saya partisipasi masyarakat masih belum benar sadar..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

Kemudian dilakukan wawancara bersama masyarakat mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan yakni AD, SI dan NL mengatakan bahwa:

“..masyarakat memang kurang memperhatikan dikarenakan kegiatannya, siang bertani ada di sawah dan kebun, sehingga tidak memperhatikan pengawasan dan pemantauan pembangunan jalan..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..saya tidak sempat memperhatikan dikarenakan kesibukan saya harus beladang di sawah atau kalau tidak di sawah ya dikebun..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..susah memang karena masyarakat punya kegiatannya masing-masing kalau siang, jadi mereka kurang memperhatikan” (Hasil wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator pengawasan dan pemantauan pada peran kepala desa Cipayung kecamatan Padarincang kabupaten Serang yakni pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalanan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam

pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Dan partisipasi masyarakat mengenai pengawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasannya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur. Serta kurangnya partisipasi masyarakat di akibatkan oleh kesibukan yang dimiliki pada siang hari sehingga tidak bisa memperhatikan secara detail mengenai pengawasan dan pemantauan.

4.3.Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

a. Faktor Pendukung

Selain faktor dukungan, ada beberapa hal yang menjadi modal utama pembangunan infrastruktur. Modal yang akan turut berpengaruh pada keberhasilan rencana-rencana tersebut, antara lain seperti:

Komitmen Pihak Terkait, Komitmen dari sejumlah pihak terkait merupakan hal pertama yang sangat memengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tentunya komitmen tersebut dibarengi dengan dukungan dari setiap elemen masyarakat.

Koordinasi Berbagai Pihak, Selanjutnya yang tak kalah penting ialah adanya koordinasi yang baik antar sejumlah pihak. Utamanya antara pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, koordinasi ini masih belum optimal dan bisa dilihat dari sejumlah proyek yang tersendat. **Pembiayaan** Faktor selanjutnya yang akan

sangat berpengaruh pada pembangunan infrastruktur ini ialah pembiayaan. Pemerintah harus menstruktur mekanime dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya, bila pembiayaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta, maka formulasinya harus tepat. Hal terakhir yang turut diperhatikan pembangunan infrastruktur di Indonesia terkait dengan tanah dan ketersediaannya. Hal ini cukup disadari oleh pemerintah dan pihak terkait untuk dicarikan solusi. Namun, bila masalah tanah terselesaikan, bukan berarti pembangunan bisa selesai. Pokoknya tetap kembali pada 3 hal yang sudah dijelaskan di atas. Dengan indikator diatas adapun beberapa pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 7 narasumber yakni, Kepala Desa, Sekertaris Desa, KAUR Keuangan Desa, Ketua BPD dan 3 masyarakat dari desa Cipayung Kecamatan Padarincanng Kabupaten Serang.

Tabel 4

Anggaran Desa

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	A. Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan			
	– Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 71.096.600	Rp. 71.096.600	Rp. –
	– Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Rp. 21.750.000	Rp. 21.750.000	Rp. –
	– Tunjangan BPD	Rp. 10.650.000	Rp. 10.650.000	Rp. –
	– Insentif RT/RW	Rp. 1.125.000	Rp. 1.125.000	Rp. –
	B. Kegiatan Operasional Perkantoran	Rp. 11.100.000	Rp. 11.100.000	Rp. –
	– Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000	Rp. –
	– Penyediaan Barang Dan			

	Jasa C. Dukungan Dan Sosialisasi Pelayanan BUMDES	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. -
	Jumlah	Rp. 158.221.600	Rp. 158.221.600	Rp. -
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa – Peningkatan Jalan Beton Tujuan Buttu Raja Kamp. Balabba (ADD) – Rehab Jembatan Gantung Dusun Tondo Bunga (ADD) – Peningkatan Jalan Beton Dusun Buttu Raja Kamp. Lomba (DDS) – Pembangunan Beton Dusun Buttu Raja Kamp. Lomba (DDS)	Rp. 533.334.5000 Rp. 47.017.800 Rp. 686.887.400 Rp. 26.303.700	Rp. 248.749.800 Rp. 47.017.800 Rp. 223.254.100 Rp. 26.303.700	Rp. 8.584.700 Rp. – Rp. 6.633.000 Rp. -
	Jumlah	Rp. 1.293.543.400	Rp. 543.325.700	Rp. 748.217.700
III	Bidang Pemberdayaan Masyarakat – Pelatihan Stunting – Pelatihan Kesiapan Menghadapi Bencana – Pelatihan KPMB – Pojok Transparansi Desa	Rp. 14.707.100 Rp. 15.702.000 Rp. 15.039.000 Rp. 1.500.000	Rp. 14.707.100 Rp. 15.702.000 Rp. 15.039.000 Rp. 750.000	Rp. – Rp. – Rp. – Rp. 750.000
	Jumlah	Rp. 46.948.100	Rp. 46.198.100	Rp. 750.000

Berdasarkan indikator faktor pendukung pembangunan desa, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang mengenai, partisipasi masyarakat desa mengenai, faktor yang mendukung pembangunan infrastruktur jalanan desa, berdasar wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) mengatakan bahwa:

“..faktor pendukung dari pembangunan infrastruktur desa khususnya ini pembangunan jalan, yakni didukung dengan dana, dalam hal ini adalah APBD desa yang diberikan kepada desa untuk membangun, kemudian partisipasi masyarakat walaupun pada pengawasan yang kurang tapi partisipasi untuk mendukung pembangunan sangat besar, serta regulasi alhamdulillah kita di dukung dengan regulasi yang baik baik itu pemerintah pusat, provinsi hingga daerah..”

“..alhamdulillah kita diberikan kemudahan, baik itu dari masyarakat dengan dukungan yang diberikan, pendanaan yang fokus kepada beberapa pembangunan saja dan beberapa hal teknis lainnya..” (hasil wawancara 25 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur desa yang yakni adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan kepada desa untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah. Kemudian selanjutnya wawancara bersama PN (KAUR keuangan) dan SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..alhamdulillah ada banyak faktor yang mendukung berjalannya ini pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan ini pertama sya kira dari masyarakat sendiri dalam memberikan dukungan, selanjutnya pemerintah karena adanya program pemberian dana desa APBD desa yang jelas, kemudian regulasi yang sekarang kalau mau membangun tidak susah dan ribet lagi..” (hasil wawancara 26 Juli 2023)

“..faktor pendukung ini dari masyarakat tentu karena memang pembangunan ini dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat, kemudian sekarang sudah enak dana APBD desa sudah tidak seperti dulu jadi semuanya sekarang serba mudah membangun..”(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Jadi berdasarkan indikator faktor pendukung dari peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di desa Cipayung Kecamatan Padarincang kabupaten Serrang ini dapat disimpulkan faktor pendukung dalam pembangunan infrastruktur desa yang yakni adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari

masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan kepada desa untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah.

b. Faktor Penghambat

Menurut Mudrajat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemerataan pembangunan daerah di era otonomi daerah adalah: Bergesernya egoisme sektoral menjadi fanatisme daerah. Dengan banyaknya bermunculan bupati/walikota di daerah seolah-olah menjadi “rajaraja kecil” di daerah yang bebas dari intervensi Pemerintah Pusat. Isu putra daerah dalam setiap pemilihan kepala daerah selalu menjadi alasan dalam pemilihan pimpinan daerah yang gaya politik baru dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal. 2) Dengan otonomi daerah, ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD. 3) Terkait dengan masalah timing dan political will. 4) Masih adanya grey-area kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota. Ini terjadi karena belum tuntasnya penyerahan sarana/prasarana maupun pengalihan dari pegawai pusat ke daerah. 5) Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik. 6) Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah. Sistem pembangunan Indonesia yang top-down dan bottom-up diharapkan menjamin adanya keseimbangan prioritas nasional dengan aspirasi lokal kenyataannya telah gagal dalam mengakomodasi aspirasi lokal.

Berdasarkan indikator faktor penghambat pembangunan desa, pada peran

kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Seang mengenai, partisipasi masyarakat desa mengenai, faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur jalanan desa, berdasar wawancara yang dilakukan bersama MJ (kepala desa) dan YG (sekertaris desa) serta SHN (ketua BPD) mengatakan bahwa:

“..ada beberapa yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan di desa ini, masih belum maksimalnya pengawasan dan pemantuan pada pembangunan sehingga terjadi tarik ulur waktu sehingga membuat pembengkakan biaya, kemudian cuaca dan medan yang sulit di desa ini, tidak bisa dilanjut juga kalau cuaca buruk dan memang pada dasarnya daerah ini medannya berat dikarenakan susahnya akses roda empat yang belum bisa masuk, dan terakhir harga material pembangunan yang mahal membuat pembengkakan biaya pada pembangunan ini..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..penghambat dari proses pembangunan infrastruktur desa ini ada beberapa, yakni cuaca yang tidak menentu pada saat musim kemarau masih sering hujan, kemudian rentan banjir jalanan yang bagus rusak lagi, kenaikan harga material untuk pembangunan yang luar biasa juga..” (hasil wawancara 25 Juli 2023)

“..faktor penghambat pembangunan ini biasanya karena faktor alam, jadi curah hujan yang tidak menentu pasti menjadi penghambat itu saja menurut saya..(hasil wawancara 26 Juli 2023)

Berdasarkan wawancara diatas mengenai faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan desa, dapat disimpulkan ada beberapa hal yakni pertama belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal menyebabkan pembengkakan biaya diluar perhitungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. pada indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah desa selalu melibatkan unsur masyarakat dan aparat kepolisian dan aparat TNI, seta semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat serta memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. dan mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada berdasarkan pedoman RPJM namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Namun masyarakat tidak tau dan paham mengenai adanya pedoman dan ketentuan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa. adapun tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa yakni masih ada masyarakat yang masih tidak puas di karenakan tidak semua aspirasi masyarakat ditindak lanjutkan.
2. pada indikator pelaksanaan, pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh

kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan desa karioago. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

3. pada indikator pengawasan dan pemantauan pada peran kepala desa Cipayung kecamatan Padarincag kabupaten Serang yakni pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan namun, beda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan, kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infastruktur jalanan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan, namun masyarakat masih tidak mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Dan partisipasi masyarakat mengenai pengasawasan dan pemantauan berdasarkan pemerintah desa bahwasannnya partisipasi masyarakat masih kurang baik itu kurang kesadaran dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrstruktur.
4. indikator faktor pendukung dari peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di desa Cipayung kecamatan Padarincang kabupaten Serang ini dapat disimpulkan faktor pendukung dalam

pembangunan infrastruktur desa yang yakni adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang diberikan kepada desa untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah

5. faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan desa, dapat disimpulkan ada beberapa hal yakni pertama belum maksimalnya pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, kemudian cuaca dan medan yang berat membuat sulitnya proses pembangunan infrastruktur dan waktu yang lama, serta bahan material pembangunan yang semakin mahal menyebabkan pembengkakan biaya diluar perhitungan.

5.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih memperhatikan pengawasan dan pemantaun dari pembangunan infrastruktur desa.
3. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk lebih tranpsaran terkait pelaksanaan pada pembangunan infrastruktur di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. (2021). Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Desa Nehas Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur). *Administrasi Publik*, 1(2), 941-950.
- Moleong, Lexy J, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, A. T., Kushari, B., & Gunawan, H. E. (2009). Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jalan Nasional KM 78-KM 79 Jalur Pantura Jawa, Kabupaten Batang). *Jurnal Teknik Sipil*, 6(3), 163-174.
- Ningrum, L., Mahardhani, A. J., & Utami, P. S. (2021). Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 12(1), 59-70.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Rohman, S. (2017). Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, e-jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Mulawarman. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 5(3), 437-447.
- Salma, S. A., Putri, V. A., Fikri, A. F., & Nawangsari, E. R. (2021). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(05), 681-695.
- Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(1).
- Susanti, N., & Satoto, S. (2020). Fungsi Kepala Desa dalam Menyelenggarakan Pembangunan. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 1(1), 11-21.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan*



R&D). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan RD*.

Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pedoman (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Infrastruktur jalan Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten

1.1 Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan pembangunan Infrastruktur jalan Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten

1.2 Aspek Yang Diamati

1. Lokasi Desa
2. Pengawasan Kepala dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Ciapyung
3. Sarana dan Prasaran membantu pengawasan
4. Pemerintahan Desa Cipaung
5. Siapa yang berperan dalam mengawasi kinerja perangkat Desa Cipayung untuk penyelesaian pembangunan Infrastruktur jalan dengan baik

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan

Wawancara Informan Kepala Desa

A. Perencanaan

1. Apakah tujuan dari pembangunan infrastruktur desa?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan desa?
3. Mengapa kegiatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan?
4. Bagaimana proses awal dari penyusunan APBDes?
5. Siapa yang berperan dalam proses penyusunan dalam proses APBDes?
6. Apa saja program yang telah dilakukan dalam penyusunan APBDes?
7. Adakah tahapan dalam penetapan APBDes terkait dengan pengelolaan keuangan desa? dalam hal ini saat ada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.
8. Dalam proses perencanaan, apa pernah mengalami kesulitan?
9. Bilamana terjadi kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa, apakah ada evaluasi?

B. Pelaksanaan

1. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa?
2. Apakah seluruh masyarakat mengambil peran dalam pelaksanaan pembangunan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembangunan?
4. Apa saja manfaat yang dirasakan jika pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan?
5. Adakah yang mengawasi proses pada saat pembangunan dilakukan?
6. Bagaimana caranya mengatur pengeluaran, agar dana yang dibutuhkan tidak lebih dari anggaran yang ada?

7. Bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran dalam mengelola keuangan desa saat ada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan?

8. Adakah tahapan dalam proses pendanaan?

9. Siapa yang berperan dalam proses pendanaan?

C. Penatausahaan

1. Bagaimana proses dalam penatausahaan yang dilakukan di Desa Cipayung?

2. Siapa saja yang berperan dalam proses tersebut dan apa saja tugasnya?

3. Adakah dokumen penatausahaan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini saat proses pembangunan infrastruktur jalan. Jika ada seperti apa?

4. Apakah desa sudah menerapkan prosedur penatausahaan dengan baik? Ataukah masih memiliki kendala?

D. Pelaporan

1. Siapa pihak yang mengelola keuangan desa?

2. Adakah dokumen pelaporan keuangan desa pada saat ada pembangunan infrastruktur jalan? Jika ada seperti apa?

E. Pertanggungjawaban

1. Siapa yang bertanggungjawab secara menyeluruh mengenai pembangunan infrastruktur desa?

2. Laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik atau belum? Jika belum, apakah ada evaluasi?

F. Partisipasi Masyarakat

1. Apakah di desa Sampetan terdapat forum musyawarah untuk menampung ide-ide untuk suatu kegiatan tertentu?

2. Jika masyarakat memberikan saran atau masukan, lalu tindakan apa yang akan dilakukan?

Informan Sekretaris Desa

1. Apa saja aturan-aturan dalam mengelola keuangan desa?
2. Dengan adanya kebijakan tersebut, apakah sudah berjalan dengan baik?
3. Apakah struktur birokrasi berpengaruh dalam mengelola keuangan desa?
4. Bagaimana mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes?

Informan Masyarakat

1. Apakah semua masyarakat atau sebagian masyarakat ikut berperan dalam kegiatan pembangunan desa?
2. Pada saat sebelum dilakukannya pembangunan apakah dilakukan musyawarah desa?
3. Jika terdapat forum musyawarah, adakah kesempatan untuk berpendapat?
4. Apakah pelaksana program dapat mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat?
5. Apa saja bentuk kontribusi yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan pembangunan?
6. Apa manfaat yang dirasakan masyarakat setelah program pembangunan selesai?
7. Siapa yang mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan?
8. Apakah pelaksana program ikut dalam mengawasi pembangunan?
9. Apakah pelaksana program sangat berperan dalam kelancaran proses pembangunan?
10. Apakah pelaksana akan melakukan evaluasi jika terdapat masalah dalam suatu kegiatan pembangunan?

11. Apakah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa?

12. Apakah perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat?

Lampiran Surat Ijin Penelitian STIPAN



SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA

Prodi Ilmu Pemerintahan: SK BAN-PT No. 2537 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2018, Terakreditasi Peringkat "B".
Prodi Ilmu Politik : SK BAN-PT No. 2017 / SK / BAN-PT / Akred / S / IX / 2016, Terakreditasi Peringkat "B".

Kampus :

Jl. Lenteng Agung No. 37 A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610 Telp/Fax. : (021) 786 7696, 788 906 72, 788 906 73
Website : www.stipan.ac.id E-mail : admin@stipan.ac.id



Jakarta, 04 Juli 2023

No : 778/STIPAN-A/VII/2023
Lamp : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Serang

Dengan Hormat

Sehubungan dengan adanya penulisan Skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara, Bersama ini Kami mohon agar mahasiswa tersebut dibawah ini, dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Bapak/Ibu

Nama : Herwan
NPM : 192070251
Judul : Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa
Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten
Dosen Pembimbing : Wahyudi Pramono, S.Ag, M.Si

Kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa kami tersebut berupa Surat Penelitian di Lokasi yang akan di teliti.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua

Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si

Lampiran Surat Ijin Kecamatan Padarincang Kab.Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PADARINCANG

Alamat : Jalan Palima Cinangka Km. 33 Kode Pos 42168

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.4/138/VII/Sekret

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Nomor : 833/STIPAN-A/VII/2023 perihal permohonan izin penelitian, dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **HERWAN**
NPM : 192070251
Judul : Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur Jalan di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang
Kabupaten Serang Provinsi Banten
Dosen pembimbing : Wahyudi Pramono, S.Ag, M.Si

Untuk melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi tugas akhir perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang berlokasi di Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padarincang, 25 Juli 2023

Camat Padarincang,



H. AGUS SAEPUKIN, SE, M.Si.
NIP. 19730109 199203 1 003

Lampiran Dokumentasi Wawancara





SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DESA CIPAYUNG KEC. PADARINCANG
KAB. SERANG - BANTEN

KEPALA DESA

TATU ROILAH



SEKRETARIAT DESA

UYUNG SOFWANI
NRPD. 231231992040701



KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

RATU NURMILA
NRPD. 231251996061402



KEPALA URUSAN KEUANGAN

ANTON SEFTIAWAN
NRPD. 231281985090901



KEPALA URUSAN PERENCANAAN

NAJIB BAEHAQI
NRPD. 231261987042001



KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

LALA LATIFAH
NRPD. 231271993121102



KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

MANSUR HOLIK
NRPD. 231231976051001



KEPALA SEKSI PELAYANAN

ENTU YUYUN
NRPD. 231241988031102





HERWAN, lahir di Serang pada tanggal 7 April 1997, merupakan putra ke-9 dari sembilan bersaudara pasangan Ibu Haeriah dan Bapak Mimi, yang sejak kecil tinggal dan di besarkan di Kabupaten Serang.

Pada usia 7 Tahun penulis masuk Sekolah Dasar dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada Tahun 2010 di SDN Cipayung, lalu melanjutkan ke Pendidikan Menengah Pertama di SMPT Bismillah yang berhasil di selesaikan pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Kejuruan di SMK Bismillah dan berhasil di selesaikan pada

Tahun 2016.

Setelah lulus, penulis mengikuti bimbingan atau program pelatihan pekerjaan dari Sekolah Menengah Kejuruan yang telah bekerjasama dengan salah satu perusahaan otomotif. Dan pada bulan November Tahun 2016 penulis diterima bekerja di PT. Indonesia Nippon Seiki. Penulis ditempatkan atau di tugaskan sebagai Operator Produksi dan sebagai Quality Control Line.

Selama 1 Tahun penulis di tugaskan sebagai Quality Control Line yang bertugas untuk mengecek kembali hasil produksi pada customer seperti, PT. Astra Honda Motor, Yamaha, dan penulis memasuki habis masa kontrak kerja pada Tahun 2018.

Setelah bekerja selama 2 Tahun di PT. Indonesia Nippon Seiki penulis melanjutkan mengajukan melamar pekerjaan di Koperasi Karyawan PT. KBN dan diterima pada Juli 2019 sampai sekarang.